



**GOVERNOR OF THE SPECIAL REGION OF
JAKARTAK**

**GOVERNOR OF THE SPECIAL REGION OF
JAKARTAK**

NO. 263 YEAR 2015

ABOUT

**CLASSIFICATION AND DETERMINATION OF THE SIZE OF THE SALE PRICE OF TAX OBJECTS
AS THE BASIS FOR THE IMPOSITION OF LAND AND BUILDING TAXES
IN RURAL AND URBAN AREAS**

WITH THE GRACE OF GOD THE MOST HIGH

GOVERNOR OF THE SPECIAL REGION OF JAKARTAK

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 263 Tahun 2014 telah diatur dan ditetapkan klasifikasi dan besarnya Nilai Jual Objek Pajak sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- b. bahwa Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai dengan perkembangan kondisi saat ini, sehingga perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Klasifikasi dan Penetapan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak;
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 242 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak;
11. Peraturan Gubernur Nomor 332 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Unit Pelayanan Pajak Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KLASIFIKASI DAN PENETAPAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Dinas Pelayanan Pajak yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Kepala Dinas Pelayanan Pajak yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan pada sektor perdesaan dan perkotaan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

7. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Perairan Pedalaman adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah dari pantai, termasuk ke dalamnya semua bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat dari suatu garis penutup.
9. Laut Wilayah atau Laut Teritorial adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil yang diukur dari garis pangkal pantai wilayah dan garis pangkal Kepulauan Seribu.
10. Pulau Pribadi adalah sebidang tanah atau daratan yang lebih kecil dari benua dan lebih besar dari karang yang terbentuk secara alami dan dikelilingi air dan selalu di atas muka air pada saat pasang naik tertinggi yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
11. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
12. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.
13. Nilai Jual Bumi Per Meter Persegi yang selanjutnya disebut Nilai Jual Bumi adalah nilai bumi per meter persegi yang diperoleh melalui harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, nilai perolehan baru atau nilai jual pengganti.
14. Nilai Jual Bangunan Per Meter Persegi yang selanjutnya disebut Nilai Jual Bangunan adalah nilai bangunan per meter persegi yang diperoleh melalui nilai perolehan baru yang dikurangi dengan penyusutan.
15. Objek Pajak Sektor Perdesaan dan Sektor Perkotaan adalah objek PBB-P2 yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali Objek Pajak Sektor Perkebunan, Objek Pajak Sektor Perhutanan dan Objek Pajak Sektor Pertambangan.
16. Klasifikasi adalah pengelompokan Nilai Jual Bumi atau Nilai Jual Bangunan yang digunakan sebagai pedoman penetapan NJOP Bumi dan NJOP Bangunan.

BAB II

KLASIFIKASI NJOP BUMI DAN NJOP BANGUNAN

Pasal 2

- (1) Klasifikasi dan besarnya NJOP Bumi tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

- (2) Besarnya NJOP Bumi berupa Perairan Pedalaman dan Laut Wilayah ditetapkan $\frac{1}{20}$ (satu per dua puluh) dari NJOP Bumi berupa tanah yang berlaku di sekitarnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi dan besarnya NJOP Bumi atas Pulau Pribadi diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 3

- (1) Klasifikasi dan besarnya NJOP Bangunan tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (2) Dalam hal Nilai Jual Bumi lebih besar dari nilai jual tertinggi dari Klasifikasi NJOP Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), maka Nilai Jual Bumi tersebut ditetapkan sebagai NJOP Bumi.
- (3) Dalam hal Nilai Jual Bangunan lebih besar dari nilai jual tertinggi dari Klasifikasi NJOP Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Nilai Jual Bangunan tersebut ditetapkan sebagai NJOP Bangunan.

BAB III

PENETAPAN NJOP BUMI DAN NJOP BANGUNAN

Pasal 4

- (1) NJOP digunakan sebagai dasar pengenaan PBB-P2.
- (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 1 (satu) tahun.
- (3) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan Nilai Jual Bumi dan/atau Nilai Jual Bangunan yang mengakibatkan perubahan klasifikasi dan besarnya NJOP dalam Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas atas nama Gubernur melakukan perubahan atas Peraturan Gubernur mengenai penetapan NJOP sebagai dasar pengenaan PBB-P2 pada tahun pajak berjalan dengan menerbitkan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 5

Penggunaan NJOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) hanya untuk kepentingan perpajakan.

Pasal 6

- (1) Ketentuan mengenai tata cara penetapan NJOP sebagai dasar pengenaan PBB-P2 diatur dengan Keputusan Kepala Dinas.

- (2) Ketentuan teknis mengenai penghitungan besarnya NJOP Bumi atas objek PBB-P2 berupa Perairan Pedalaman dan Laut Wilayah dan NJOP Bumi atas Pulau Pribadi diatur dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 263 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Penetapan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2015

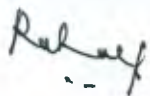
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2015 NOMOR 71040

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SRI RAHAYU
NIP 195712281985032003

Nomor 263 TAHUN 2015
Tanggal 31 Desember 2015

KLASIFIKASI NILAI JUAL BUMI DAN PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI

KELAS	PENGELOMPOKAN NILAI JUAL BUMI (Rp/m ²)	NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI BERUPA TANAH (Rp/m ²)	NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI BERUPA PERAIRAN PEDALAMAN DAN LAUT WILAYAH (Rp/m ²)
001	> 149.855.000 s.d. 152.185.000	151.020.000	7.551.000
002	> 147.550.000 s.d. 149.855.000	148.703.000	7.435.150
003	> 145.270.000 s.d. 147.550.000	146.410.000	7.320.500
004	> 143.015.000 s.d. 145.270.000	144.143.000	7.207.150
005	> 140.785.000 s.d. 143.015.000	141.900.000	7.095.000
006	> 138.580.000 s.d. 140.785.000	139.683.000	6.984.150
007	> 136.400.000 s.d. 138.580.000	137.490.000	6.874.500
008	> 134.245.000 s.d. 136.400.000	135.323.000	6.766.150
009	> 132.115.000 s.d. 134.245.000	133.180.000	6.659.000
010	> 130.010.000 s.d. 132.115.000	131.063.000	6.553.150
011	> 127.930.000 s.d. 130.010.000	128.970.000	6.448.500
012	> 125.875.000 s.d. 127.930.000	126.903.000	6.345.150
013	> 123.845.000 s.d. 125.875.000	124.860.000	6.243.000
014	> 121.840.000 s.d. 123.845.000	122.843.000	6.142.150
015	> 119.860.000 s.d. 121.840.000	120.850.000	6.042.500
016	> 117.905.000 s.d. 119.860.000	118.883.000	5.944.150
017	> 115.975.000 s.d. 117.905.000	116.940.000	5.847.000
018	> 114.070.000 s.d. 115.975.000	115.023.000	5.751.150
019	> 112.190.000 s.d. 114.070.000	113.130.000	5.656.500
020	> 110.335.000 s.d. 112.190.000	111.263.000	5.563.150
021	> 108.505.000 s.d. 110.335.000	109.420.000	5.471.000
022	> 106.700.000 s.d. 108.505.000	107.603.000	5.380.150
023	> 104.920.000 s.d. 106.700.000	105.810.000	5.290.500
024	> 103.165.000 s.d. 104.920.000	104.043.000	5.202.150
025	> 101.435.000 s.d. 103.165.000	102.300.000	5.115.000
026	> 99.730.000 s.d. 101.435.000	100.583.000	5.029.150
027	> 98.050.000 s.d. 99.730.000	98.890.000	4.944.500
028	> 96.395.000 s.d. 98.050.000	97.223.000	4.861.150
029	> 94.765.000 s.d. 96.395.000	95.580.000	4.779.000
030	> 93.160.000 s.d. 94.765.000	93.963.000	4.698.150
031	> 91.580.000 s.d. 93.160.000	92.370.000	4.618.500
032	> 90.025.000 s.d. 91.580.000	90.803.000	4.540.150
033	> 88.495.000 s.d. 90.025.000	89.260.000	4.463.000
034	> 86.990.000 s.d. 88.495.000	87.743.000	4.387.150
035	> 85.510.000 s.d. 86.990.000	86.250.000	4.312.500
036	> 84.055.000 s.d. 85.510.000	84.783.000	4.239.150
037	> 82.625.000 s.d. 84.055.000	83.340.000	4.167.000
038	> 81.220.000 s.d. 82.625.000	81.923.000	4.096.150
039	> 79.840.000 s.d. 81.220.000	80.530.000	4.026.500
040	> 78.485.000 s.d. 79.840.000	79.163.000	3.958.150
041	> 77.155.000 s.d. 78.485.000	77.820.000	3.891.000
042	> 75.850.000 s.d. 77.155.000	76.503.000	3.825.150

KELAS	PENGELOMPOKAN NILAI JUAL BUMI (Rp/m ²)	NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI BERUPA TANAH (Rp/m ²)	NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI BERUPA PERAIRAN PEDALAMAN DAN LAUT WILAYAH (Rp/m ²)
043	> 74.570.000 s.d. 75.850.000	75.210.000	3.760.500
044	> 73.315.000 s.d. 74.570.000	73.943.000	3.697.150
045	> 72.085.000 s.d. 73.315.000	72.700.000	3.635.000
046	> 70.880.000 s.d. 72.085.000	71.483.000	3.574.150
047	> 69.700.000 s.d. 70.880.000	70.290.000	3.514.500
048	> 68.545.000 s.d. 69.700.000	69.123.000	3.456.150
049	> 67.390.000 s.d. 68.545.000	68.545.000	3.427.250
050	> 66.255.000 s.d. 67.390.000	66.823.000	3.341.150
051	> 65.120.000 s.d. 66.255.000	66.255.000	3.312.750
052	> 64.005.000 s.d. 65.120.000	64.563.000	3.228.150
053	> 62.890.000 s.d. 64.005.000	64.000.000	3.200.000
054	> 61.795.000 s.d. 62.890.000	62.343.000	3.117.150
055	> 60.700.000 s.d. 61.795.000	61.795.000	3.089.750
056	> 59.625.000 s.d. 60.700.000	60.163.000	3.008.150
057	> 58.550.000 s.d. 59.625.000	59.625.000	2.981.250
058	> 57.495.000 s.d. 58.550.000	58.023.000	2.901.150
059	> 56.440.000 s.d. 57.495.000	57.495.000	2.874.750
060	> 55.405.000 s.d. 56.440.000	55.923.000	2.796.150
061	> 54.370.000 s.d. 55.405.000	55.405.000	2.770.250
062	> 53.355.000 s.d. 54.370.000	53.863.000	2.693.150
063	> 52.340.000 s.d. 53.355.000	53.355.000	2.667.750
064	> 51.345.000 s.d. 52.340.000	51.843.000	2.592.150
065	> 50.350.000 s.d. 51.345.000	51.345.000	2.567.250
066	> 49.375.000 s.d. 50.350.000	49.863.000	2.493.150
067	> 48.400.000 s.d. 49.375.000	49.375.000	2.468.750
068	> 47.445.000 s.d. 48.400.000	47.923.000	2.396.150
069	> 46.490.000 s.d. 47.445.000	47.445.000	2.372.250
070	> 45.555.000 s.d. 46.490.000	46.023.000	2.301.150
071	> 44.620.000 s.d. 45.555.000	45.555.000	2.277.750
072	> 43.705.000 s.d. 44.620.000	44.163.000	2.208.150
073	> 42.790.000 s.d. 43.705.000	43.705.000	2.185.250
074	> 41.895.000 s.d. 42.790.000	42.343.000	2.117.150
075	> 41.000.000 s.d. 41.895.000	41.895.000	2.094.750
076	> 40.125.000 s.d. 41.000.000	40.563.000	2.028.150
077	> 39.250.000 s.d. 40.125.000	40.125.000	2.006.250
078	> 38.395.000 s.d. 39.250.000	38.823.000	1.941.150
079	> 37.540.000 s.d. 38.395.000	38.395.000	1.919.750
080	> 36.705.000 s.d. 37.540.000	37.123.000	1.856.150
081	> 35.870.000 s.d. 36.705.000	36.705.000	1.835.250
082	> 35.055.000 s.d. 35.870.000	35.463.000	1.773.150
083	> 34.240.000 s.d. 35.055.000	35.055.000	1.752.750
084	> 33.445.000 s.d. 34.240.000	33.843.000	1.692.150
085	> 32.650.000 s.d. 33.445.000	33.445.000	1.672.250
086	> 31.875.000 s.d. 32.650.000	32.263.000	1.613.150
087	> 31.100.000 s.d. 31.875.000	31.875.000	1.593.750
088	> 30.345.000 s.d. 31.100.000	30.723.000	1.536.150
089	> 29.590.000 s.d. 30.345.000	30.345.000	1.517.250
090	> 28.855.000 s.d. 29.590.000	29.223.000	1.461.150

KELAS	PENGELOMPOKAN NILAI JUAL BUMI (Rp/m ²)	NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI BERUPA TANAH (Rp/m ²)	NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI BERUPA PERAIRAN PEDALAMAN DAN LAUT WILAYAH (Rp/m ²)
091	> 28.120.000 s.d. 28.855.000	28.855.000	1.442.750
092	> 27.405.000 s.d. 28.120.000	27.763.000	1.388.150
093	> 26.690.000 s.d. 27.405.000	27.405.000	1.370.250
094	> 25.995.000 s.d. 26.690.000	26.343.000	1.317.150
095	> 25.300.000 s.d. 25.995.000	25.995.000	1.299.750
096	> 24.625.000 s.d. 25.300.000	24.963.000	1.248.150
097	> 23.950.000 s.d. 24.625.000	24.625.000	1.231.250
098	> 23.295.000 s.d. 23.950.000	23.623.000	1.181.150
099	> 22.640.000 s.d. 23.295.000	23.295.000	1.164.750
100	> 22.005.000 s.d. 22.640.000	22.323.000	1.116.150
101	> 21.370.000 s.d. 22.005.000	22.005.000	1.100.250
102	> 20.755.000 s.d. 21.370.000	21.063.000	1.053.150
103	> 20.140.000 s.d. 20.755.000	20.755.000	1.037.750
104	> 19.545.000 s.d. 20.140.000	19.843.000	992.150
105	> 18.950.000 s.d. 19.545.000	19.545.000	977.250
106	> 18.375.000 s.d. 18.950.000	18.663.000	933.150
107	> 17.800.000 s.d. 18.375.000	18.375.000	918.750
108	> 17.245.000 s.d. 17.800.000	17.523.000	876.150
109	> 16.690.000 s.d. 17.245.000	17.245.000	862.250
110	> 16.155.000 s.d. 16.690.000	16.423.000	821.150
111	> 15.620.000 s.d. 16.155.000	16.155.000	807.750
112	> 15.105.000 s.d. 15.620.000	15.363.000	768.150
113	> 14.590.000 s.d. 15.105.000	15.105.000	755.250
114	> 14.095.000 s.d. 14.590.000	14.343.000	717.150
115	> 13.600.000 s.d. 14.095.000	14.095.000	704.750
116	> 13.125.000 s.d. 13.600.000	13.363.000	668.150
117	> 12.650.000 s.d. 13.125.000	13.125.000	656.250
118	> 12.195.000 s.d. 12.650.000	12.423.000	621.150
119	> 11.740.000 s.d. 12.195.000	12.195.000	609.750
120	> 11.305.000 s.d. 11.740.000	11.523.000	576.150
121	> 10.870.000 s.d. 11.305.000	11.305.000	565.250
122	> 10.455.000 s.d. 10.870.000	10.663.000	533.150
123	> 10.040.000 s.d. 10.455.000	10.455.000	522.750
124	> 9.645.000 s.d. 10.040.000	9.843.000	492.150
125	> 9.250.000 s.d. 9.645.000	9.645.000	482.250
126	> 8.875.000 s.d. 9.250.000	9.063.000	453.150
127	> 8.500.000 s.d. 8.875.000	8.875.000	443.750
128	> 8.145.000 s.d. 8.500.000	8.323.000	416.150
129	> 7.790.000 s.d. 8.145.000	8.145.000	407.250
130	> 7.455.000 s.d. 7.790.000	7.623.000	381.150
131	> 7.120.000 s.d. 7.455.000	7.455.000	372.750
132	> 6.805.000 s.d. 7.120.000	6.963.000	348.150
133	> 6.490.000 s.d. 6.805.000	6.805.000	340.250
134	> 6.195.000 s.d. 6.490.000	6.343.000	317.150
135	> 5.900.000 s.d. 6.195.000	6.195.000	309.750
136	> 5.625.000 s.d. 5.900.000	5.763.000	288.150
137	> 5.350.000 s.d. 5.625.000	5.625.000	281.250
138	> 5.005.000 s.d. 5.350.000	5.223.000	261.150

KELAS	PENGELOMPOKAN NILAI JUAL BUMI (Rp/m ²)	NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI BERUPA TANAH (Rp/m ²)	NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI BERUPA PERAIRAN PEDALAMAN DAN LAUT WILAYAH (Rp/m ²)
139	> 4.840.000 s.d. 5.095.000	5.095.000	254.750
140	> 4.605.000 s.d. 4.840.000	4.723.000	236.150
141	> 4.370.000 s.d. 4.605.000	4.605.000	230.250
142	> 4.155.000 s.d. 4.370.000	4.263.000	213.150
143	> 3.940.000 s.d. 4.155.000	4.155.000	207.750
144	> 3.745.000 s.d. 3.940.000	3.843.000	192.150
145	> 3.550.000 s.d. 3.745.000	3.745.000	187.250
146	> 3.200.000 s.d. 3.550.000	3.375.000	168.750
147	> 3.000.000 s.d. 3.200.000	3.100.000	155.000
148	> 2.850.000 s.d. 3.000.000	2.925.000	146.250
149	> 2.708.000 s.d. 2.850.000	2.779.000	138.950
150	> 2.573.000 s.d. 2.708.000	2.640.000	132.000
151	> 2.444.000 s.d. 2.573.000	2.508.000	125.400
152	> 2.261.000 s.d. 2.444.000	2.352.000	117.600
153	> 2.091.000 s.d. 2.261.000	2.176.000	108.800
154	> 1.934.000 s.d. 2.091.000	2.013.000	100.650
155	> 1.789.000 s.d. 1.934.000	1.862.000	93.100
156	> 1.655.000 s.d. 1.789.000	1.722.000	86.100
157	> 1.490.000 s.d. 1.655.000	1.573.000	78.650
158	> 1.341.000 s.d. 1.490.000	1.416.000	70.800
159	> 1.207.000 s.d. 1.341.000	1.274.000	63.700
160	> 1.086.000 s.d. 1.207.000	1.147.000	57.350
161	> 977.000 s.d. 1.086.000	1.032.000	51.600
162	> 855.000 s.d. 977.000	916.000	45.800
163	> 748.000 s.d. 855.000	802.000	40.100
164	> 655.000 s.d. 748.000	702.000	35.100
165	> 573.000 s.d. 655.000	614.000	30.700
166	> 501.000 s.d. 573.000	537.000	26.850
167	> 426.000 s.d. 501.000	464.000	23.200
168	> 362.000 s.d. 426.000	394.000	19.700
169	> 308.000 s.d. 362.000	335.000	16.750
170	> 262.000 s.d. 308.000	285.000	14.250
171	> 223.000 s.d. 262.000	243.000	12.150
172	> 178.000 s.d. 223.000	200.000	10.000
173	> 142.000 s.d. 178.000	160.000	8.000
174	> 114.000 s.d. 142.000	128.000	6.400
175	> 91.000 s.d. 114.000	103.000	5.150
176	> 73.000 s.d. 91.000	82.000	4.100
177	> 55.000 s.d. 73.000	64.000	3.200
178	> 41.000 s.d. 55.000	48.000	2.400
179	> 31.000 s.d. 41.000	36.000	1.800
180	> 23.000 s.d. 31.000	27.000	1.350
181	> 17.000 s.d. 23.000	20.000	1.000
182	> 12.000 s.d. 17.000	14.000	700
183	> 8.400 s.d. 12.000	10.000	500
184	> 5.900 s.d. 8.400	7.150	358
185	> 4.100 s.d. 5.900	5.000	250
186	> 2.000 s.d. 4.100	3.500	175

KELAS	PENGELOMPOKAN NILAI JUAL BUMI (Rp/m ²)	NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI BERUPA TANAH (Rp/m ²)	NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI BERUPA PERAIRAN PEDALAMAN DAN LAUT WILAYAH (Rp/m ²)
187	> 2.000 s.d. 2,900	2,450	123
188	> 1.400 s.d. 2,000	1,700	85
189	> 1.050 s.d. 1,400	1,200	60
190	< 1.050	910	46

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 263 TAHUN 2015
Tanggal 31 Desember 2015

KLASIFIKASI NILAI JUAL BUMI DAN PENETAPAN
NILAI JUAL OBJEK PAJAK BANGUNAN

KELAS	PENGELOMPOKAN NILAI JUAL BANGUNAN (Rp/m ²)	NILAI JUAL OBJEK PAJAK (Rp/m ²)
001	> 48.300.000 s.d. 50.450.000	49.375.000
002	> 46.200.000 s.d. 48.300.000	47.250.000
003	> 44.150.000 s.d. 46.200.000	45.175.000
004	> 42.150.000 s.d. 44.150.000	43.150.000
005	> 40.200.000 s.d. 42.150.000	41.175.000
006	> 38.300.000 s.d. 40.200.000	39.250.000
007	> 36.450.000 s.d. 38.300.000	37.375.000
008	> 34.650.000 s.d. 36.450.000	35.550.000
009	> 32.900.000 s.d. 34.650.000	33.775.000
010	> 31.200.000 s.d. 32.900.000	32.050.000
011	> 29.550.000 s.d. 31.200.000	30.375.000
012	> 27.950.000 s.d. 29.550.000	28.750.000
013	> 26.400.000 s.d. 27.950.000	27.175.000
014	> 24.900.000 s.d. 26.400.000	25.650.000
015	> 23.450.000 s.d. 24.900.000	24.175.000
016	> 22.050.000 s.d. 23.450.000	22.750.000
017	> 20.700.000 s.d. 22.050.000	21.375.000
018	> 19.400.000 s.d. 20.700.000	20.050.000
019	> 18.150.000 s.d. 19.400.000	18.775.000
020	> 16.950.000 s.d. 18.150.000	17.550.000
021	> 15.800.000 s.d. 16.950.000	16.375.000
022	> 14.700.000 s.d. 15.800.000	15.250.000
023	> 13.600.000 s.d. 14.700.000	14.150.000
024	> 12.550.000 s.d. 13.600.000	13.075.000
025	> 11.550.000 s.d. 12.550.000	12.050.000
026	> 10.600.000 s.d. 11.550.000	11.075.000

KELAS	PENGELOMPOKAN NILAI JUAL BANGUNAN (Rp/m2)	NILAI JUAL OBJEK PAJAK (Rp/m2)
027	> 9.700.000 s.d. 10.600.000	10.150.000
028	> 8.850.000 s.d. 9.700.000	9.275.000
029	> 8.050.000 s.d. 8.850.000	8.450.000
030	> 7.300.000 s.d. 8.050.000	7.675.000
031	> 6.600.000 s.d. 7.300.000	6.950.000
032	> 5.850.000 s.d. 6.600.000	6.225.000
033	> 5.150.000 s.d. 5.850.000	5.500.000
034	> 4.500.000 s.d. 5.150.000	4.825.000
035	> 3.900.000 s.d. 4.500.000	4.200.000
036	> 3.350.000 s.d. 3.900.000	3.625.000
037	> 2.850.000 s.d. 3.350.000	3.100.000
038	> 2.400.000 s.d. 2.850.000	2.625.000
039	> 2.000.000 s.d. 2.400.000	2.200.000
040	> 1.666.000 s.d. 2.000.000	1.833.000
041	> 1.366.000 s.d. 1.666.000	1.516.000
042	> 1.034.000 s.d. 1.366.000	1.200.000
043	> 902.000 s.d. 1.034.000	968.000
044	> 744.000 s.d. 902.000	823.000
045	> 656.000 s.d. 744.000	700.000
046	> 534.000 s.d. 656.000	595.000
047	> 476.000 s.d. 534.000	505.000
048	> 382.000 s.d. 476.000	429.000
049	> 348.000 s.d. 382.000	365.000
050	> 272.000 s.d. 348.000	310.000
051	> 256.000 s.d. 272.000	264.000
052	> 194.000 s.d. 256.000	225.000
053	> 188.000 s.d. 194.000	191.000
054	> 136.000 s.d. 188.000	162.000
055	> 128.000 s.d. 136.000	132.000
056	> 104.000 s.d. 128.000	116.000
057	> 92.000 s.d. 104.000	98.000
058	> 74.000 s.d. 92.000	83.000

KELAS	PENGELOMPOKAN NILAI JUAL BANGUNAN (Rp/m ²)	NILAI JUAL OBJEK PAJAK (Rp/m ²)
047	> 476.000 s.d. 534,000	505,000
048	> 382.000 s.d. 476,000	429,000
049	> 348.000 s.d. 382,000	365,000
050	> 272.000 s.d. 348,000	310,000
051	> 256.000 s.d. 272,000	264,000
052	> 194.000 s.d. 256,000	225,000
053	> 188.000 s.d. 194,000	191,000
054	> 136.000 s.d. 188,000	162,000
055	> 128.000 s.d. 136,000	132,000
056	> 104.000 s.d. 128,000	116,000
057	> 92.000 s.d. 104,000	98,000
058	> 74.000 s.d. 92,000	83,000
059	> 60.000 s.d. 74,000	71,000
060	≤ 60.000	50,000

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA